

# Model Perancangan Good Governance Government Untuk Mewujudkan Government Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Pada Pemerintah Kota Depok

*by* Bambang Jatmiko

---

**Submission date:** 20-Oct-2017 02:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 865984039

**File name:** B.22\_-\_BBJ.pdf (1.33M)

**Word count:** 4925

**Character count:** 32075

# MODEL PERANCANGAN *GOOD GOVERNANCE GOVERNMENT* UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PEMERINTAHAN KOTA DEPOK

Bambang Jatmiko, SE., MSi., Dr.  
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)  
Email: bambang\_jatmiko65@yahoo.com/HP:08157184940

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model Teknologi Informasi GGG (*Good Governance Government*) dan Kinerja dengan, dimulai dari metode survey dengan menyebarkan kuesioner untuk menggali permasalahan terkait aspek *Good Governance Government* terhadap Kinerja Pemda Kota Depok. Kemudian merumuskan dan indentifikasi terhadap permasalahan di Pemda kota Depok, kemudian menyebarkan kuesioner ke seluruh SKPD dan dinas terkait. Pada model perancangan, penelitian ini akan menggunakan metode UML (*Unified Modelling Language*). Dimana UML mendefinisikan 13 buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram yaitu *structure diagram*, *behavior diagram* dan *interaction diagram*. Yang tergolong ke dalam *structure diagram* yaitu *Class Diagram*, *Component Diagram*, *Composite Structure Diagram*, *Deployment Diagram*, *Object Diagram*, *Package Diagram*. Yang tergolong ke dalam *behavior diagram* yaitu *Activity Diagram*, *Usecase Diagram*, *State Machine Diagram*. Sedangkan yang tergolong ke dalam *Interaction Diagram* yaitu *Sequence Diagram*, *Communication Diagram*, *Interaction Overview Diagram* dan *Timing Diagram*. Tetapi UML yang sering digunakan dari ketiga kelompok tersebut yaitu *Class Diagram* dari kelompok *Structure Diagram*, *Usecase Diagram* dari kelompok *Behavior Diagram* dan *Sequence Diagram* dari kelompok *Interaction Diagram*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (a) Hubungan antara *participation* terhadap kinerja adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *participation* dengan kinerja; (b) Hubungan antara *rule of law* terhadap kinerja adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *rule of law* dengan kinerja; (c) Hubungan antara *transparency* terhadap kinerja adalah kuat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *transparency* terhadap kinerja; (d) Hubungan antara *responsiveness* terhadap kinerja kuat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *responsiveness* dengan kinerja; (e) Hubungan antara *consensus orientation* dengan kinerja. Memiliki hubungan/korelasi kuat; (f) Hubungan antara *equity* terhadap kinerja., memiliki hubungan kuat; (g) Terdapat pengaruh yang signifikan antara *efficiency and effectiveness* terhadap kinerja. Sedangkan hubungan antara *efficiency and effectiveness* terhadap kinerja adalah kuat; (h) Terdapat pengaruh yang signifikan antara *accountability* terhadap kinerja. Sedangkan hubungan antara *accountability* terhadap kinerja adalah kuat; (i) terbangunnya Model UML (*Unified Modelling Language*) mendefinisikan 13 buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram yaitu *structure diagram*, *behavior diagram* dan *interaction diagram*. Yang tergolong ke dalam *structure diagram* yaitu *Class Diagram*, *Component Diagram*, *Composite Structure Diagram*, *Deployment Diagram*, *Object Diagram*, *Package Diagram*. Untuk memodelkan GGG dan Kinerja Pemda Depok.

**Keyword:** *Good Governance Government*, Kinerja, Model UML (*Unified Modelling Language*)

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerapan *Good Governance Government* mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997. Pada tahun 1997-1998 terjadi gelombang reformasi antara lain menuntut adanya reformasi disegala bidang termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tuntutan otonomi daerah yang lebih terdesentralisasi. Maka untuk mewujudkan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Dimana ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu Mengikutsertakan semua; Transparan dan bertanggung jawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Untuk itu kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja nonkeuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauhmana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun maksud dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Terkait dengan rendahnya penerapan *Good Government Governance*, yaitu rendahnya transparansi dalam lingkungan pemerintah. Ketidaktransparanan ini menimbulkan tumbuh berkembangnya praktek-praktek yang tidak

sehat yang tidak saja merugikan masyarakat dan pemerintah tetapi dapat merugikan negara, praktek-praktek yang tidak sehat ini yang biasa dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di daerah Jawa Timur, yang tidak hanya merugikan masyarakat setempat tetapi juga merugikan Negara. Maka untuk itu diupayakan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan penerapan prinsip *Good Governance Government* dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan, agar tidak terjadi penyimpangan yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika pemerintah dapat menerapkan semua prinsip *Good Governance Government*. Maka dari uraian diatas sudah seharusnya Pemerintah Daerah menerapkan prinsip *Good Governance Government*. penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang dituangkan dalam usulan penelitian yang penulis beri judul "Model Perancangan *Good Governance Government* Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Pada Pemerintahan Kota Depok".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Salvator: 2005), perubahan organisasi diperlukan bagi perusahaan adalah untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan organisasi merujuk pada setiap perubahan atau modifikasi organisasi atau fungsi-fungsi dari organisasi (Smit and Cronje: 1992) dalam G.Suprayitno, et.al (2005, 6-11). Dapat pula dikatakan bahwa perubahan organisasi merupakan perubahan dalam rancangan atau strategi organisasi, atau beberapa usaha lainnya untuk mempengaruhi anggota organisasi agar bertindak secara berbeda (Lorsch : 1976) dalam G.Suprayitno, et.al (2005: 6-11)., atau suatu usaha yang bertujuan untuk memperbaiki semua komponen organisasi seperti misi, strategi, struktur, proses sumber daya manusia maupun budaya (Dani: 2002) dalam G.Suprayitno, et.al (2005: 6-11).

Oleh karena itu perubahan organisasi memiliki dua dimensi yaitu: (1) Memperkuat kapasitas dengan asumsi bahwa keterbatasan organisasi untuk mencapai misinya disebabkan oleh kelemahan dalam sumber daya manusia yang dimiliki. (2) Memposisikan kembali (*repositioning*) dengan asumsi bahwa hal tersebut diperlukan pada saat organisasi menetapkan strategi baru dan program baru yang terkait dengan perubahan institusional.

Dari sudut pandang teori-teori tentang perusahaan, maka kondisi ini mengacu pada *agen principal theories*. *Psychological foundation*, pada prinsipnya masih ada kaitannya dengan *historical foundation*, karena adanya anggapan bahwa manusia itu adalah *self interested behaviour* yang mengutamakan kepentingan dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Anggapan ini bermakna bahwa agen akan lebih mengutamakan kepentingannya dibawah pengeluaran pemilik (seandainya agen melakukan pengembangan perusahaan untuk mendapatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi investasi yang dilakukan cenderung memiliki tingkat pengembalian kecil). Anti-thesis yang muncul dari kedua anggapan tersebut adalah dalam upaya memperkuat struktur (terutama *internal control mechanism*) melalui pemberdayaan dewan komisaris. Dalam anti-thesis ini, tingkat independensi dan pengetahuan dari dewan komisaris sangat penting, namun hal ini memunculkan tesis berikutnya bahwa dewan komisaris yang independen sekalipun adalah manusia yang secara psikologis mempunyai sifat yang sama (Syakhroza, 2003). Dari sudut pandang teori-teori tentang perusahaan, kondisi ini mengacu pada *incomplete contracting theories* dengan beberapa peneliti, seperti Coase (1937); Simon (1951);

Williamson (1971, 1975, 1985, 1996); Grossman dan Hart (1986); Hart dan Moore (1990); Hart (1995) serta Bakker, Gibbons dan Murphy (1997) G. Suprayitno, et.al (2005: 6-11). Berdasarkan ketiga pondasi diatas, dapat dikatakan bahwa efektifitas pelaksanaan *good corporate governance* terkait dengan perubahan organisasi. Dengan perubahan organisasi tersebut, diharapkan dapat menilai fungsi-fungsi organisasi perusahaan

saat ini dalam rangka merancang intervensi perubahan dalam struktur, fungsi prosedur termasuk perilaku para pengelola perusahaan, sehingga organisasi perusahaan dapat memenuhi tuntutan dari lingkungannya untuk mencapai *good corporate governance*.

Adapun prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD itu mencakup hal-hal berikut:

- a. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan-penerapan prinsip *good corporate governance* secara efektif (*measuring the basis for an effective corporate governance framework*).
- b. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (*the rights of shareholders and key ownership functions*).
- c. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).
- d. Peranan the shareholders dalam corporate governance (*the role of stakeholders in corporate governance*).
- e. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan (*disclosure and transparency*).

Unsur-unsur *Balanced Scorecard (BSC)* terbagi ke dalam empat perspektif. Perspektif paling banyak digunakan adalah keempat perspektif seperti dibawah ini. (Kaplan and Norton, 1996):

1. **Keuangan (Financial):**  
Uang yang berbicara. Bagaimana *shareholders* memandang perusahaan. Apa arti perusahaan bagi *shareholders*.
2. **Pelanggan (Customer):**  
Kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Apa arti perusahaan tersebut bagi pelanggan.
3. **Proses-proses bisnis internal (Internal Business Process):**  
proses pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan proses bisnis utama sebagai upaya untuk menciptakan nilai kepada pelanggan. Dalam proses bagaimana kita harus memperhitungkan keberlanjutan kepuasan pelanggan.

#### 4. Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*):

Keahlian dan sikap pegawai serta kemampuan pembelajaran organizational. Bagaimana perusahaan mampu meraih kesuksesan pada masa yang akan datang? Bagaimana kita belajar dan mengkomunikasikan kemajuan kita sendiri dan melalui tindakan tersebut kita menyampaikan visi? Perspektif penting seperti ini dijelaskan secara rinci dalam kotak dibawah ini.

Kekuatan sesungguhnya *Balanced Scorecard* bukan terletak pada kemampuannya sebagai pengukur kinerja eksekutif, namun justru pada kemampuannya sebagai alat perencanaan strategik. Pencipta *Balanced Scorecard*-Kaplan dan Norton – membuat pernyataan pada tahun 1995 tentang kekuatan sesungguhnya *Balanced Scorecard* sebagai berikut ini: *The real power of the Balanced Scorecard, however, occurs when it is transformed from a measurement system to a management system.*<sup>1</sup> (Namun, kekuatan sesungguhnya *Balanced Scorecard* terjadi pada saat *Balanced Scorecard* diubah dari suatu sistem pengukuran kinerja menjadi sistem manajemen).

### 3. METODE PENELITIAN

Secara garis besar, ada dua tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan akhir penelitian. Tahapan ini dirumuskan mengacu pada kerangka konseptual penelitian sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1. Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Merancang model Implementasi GGG sesuai dengan tujuan dan karakter Pemda Kota Depok
- 2) Merancang aplikasi Software yang lengkap sampai dengan uji coba aplikasi tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan model software dimana pengembangan model dilakukan dari mulai sistem manual berlanjut sampai ke level analisis, perancangan, pemrograman, dan

pengujian. Mengingat tujuan setiap tahapan penelitian berbeda, maka metode penelitian dalam hal ini juga disesuaikan untuk setiap tahapan tersebut.

### 4. PEMBAHASAN HASIL

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran

- Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kукusan, dan Kelurahan Tanah Baru.
  3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan

Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilandong, Kelurahan Jati Mulya, dan Kelurahan Tirta Jaya.

Dari tahun 1982-1999, penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut :

1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)	[Walikotatif]	1982 – 1984
2. Drs. H.M.J Tamdjid	[Walikotatif]	1984 – 1988
3. Drs. Abdul Wachyan	[Walikotatif]	1988 – 1991
4. Drs. Moch. Masduki	[Walikotatif]	1991 – 1992
5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim	[Walikotatif]	1992 – 1996
6. Drs. H. Yuyun WS	[Plh Walikotatif]	1996 – 1997
7. H. Badrul Kamal	[Walikotatif]	1997 – 1999

#### Model Unified Modelling Language Untuk GGG dan Kinerja

Unified Modeling Language (UML) memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah "keluarga notasi grafis yang didukung oleh model-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi object (OO)" Fowler (2004 : 1). UML juga merupakan bahasa yang digunakan untuk menangkap dan menggambarkan pengetahuan, menemukan dan membangun sistem serta memodelkan pembangunan sistem secara visual. UML terdiri dari 2 komponen utama yaitu bentuk Analisis dan Design. Analisis UML terdiri dari Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Activity Diagram dan Statechart Diagram. Design UML terdiri dari Component Diagram dan Deployment Diagram. UML mendefinisikan 13 buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram yaitu structure diagram, behavior diagram dan interaction diagram. Yang tergolong ke dalam *structure diagram* yaitu *Class Diagram*, *Component Diagram*, *Composite Structure Diagram*, *Deployment Diagram*, *Object Diagram*, *Package Diagram*. Yang tergolong ke dalam *behavior diagram* yaitu *Activity Diagram*, *Usecase Diagram*, *State Machine Diagram*.

Sedangkan yang tergolong ke dalam *Interaction Diagram* yaitu *Sequence Diagram*, *Communication Diagram*, *Interaction Overview Diagram* dan *Timing Diagram*. Tetapi UML yang sering digunakan dari ketiga kelompok tersebut yaitu *Class Diagram* dari kelompok *Structure Diagram*, *Usecase Diagram* dari kelompok *Behavior Diagram* dan *Sequence Diagram* dari kelompok *Interaction Diagram*.

#### 4.1. Use Case Diagram

*Use case diagram* menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat sistem, dan bukan "bagaimana". Sebuah *use case* merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. *Use case* merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya *login* ke sistem, *create* sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (Martin, 2005 : 44).

#### 4.2. Sequence Diagram

*Sequence Diagram* menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, *display*, dan sebagainya)

berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu. *Sequence diagram* terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). *Sequence Diagram* biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah *event* untuk menghasilkan *output* tertentu. Diawali dari apa yang men-*trigger* aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan *output* apa yang dihasilkan (Martin, 2005 : 48).

#### 4.3. Class Diagram

*Class* adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. *Class* menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). *Class diagram* menggambarkan struktur dan deskripsi *class*, *package* dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. *Class* memiliki tiga area pokok (Martin, 2005 : 54):

1. Nama (dan stereotype)
2. Atribut
3. Metoda

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :

- *Private*, tidak dapat dipanggil dari luar *class* yang bersangkutan
- *Protected*, hanya dapat dipanggil oleh *class* yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya
- *Public*, dapat dipanggil oleh siapa saja.

Untuk lebih jelasnya model Good Governance Government dan Kinerja Pemerintah daerah dapat dilihat pada tahapan model sebagai berikut:

#### a. Use Case Diagram Good Governance Government

Skenario Proses meliputi: skenario proses login, skenario perspektif keuangan, skenario perspektif konsumen, skenario perspektif proses

bisnis, skenario proses perspektif pembelajaran, skenario proses transparansi, skenario proses participation, skenario proses responsiveness, skenario proses rule of law, skenario proses consensus orientation, skenario proses equity, skenario proses accountability, skenario proses efficiency dan effectiveness, tidak saya munculkan pada tulisan ini, karena terlalu banyak sehingga memakan tempat.

#### 4.4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Depok dengan judul *Model Perancangan Good Governance Government Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Pada Pemerintahan Kota Depok.*, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan antara *participation* terhadap kinerja adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *participation* dengan kinerja.
2. Hubungan antara *rule of law* terhadap kinerja adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *rule of law* dengan kinerja.
3. Hubungan antara *transparency* terhadap kinerja adalah kuat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *transparency* terhadap kinerja.
4. Hubungan antara *responsiveness* terhadap kinerja kuat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *responsiveness* dengan kinerja.
5. Hubungan antara *consensus orientation* dengan kinerja. Memiliki hubungan/korelasi kuat,
6. Hubungan antara *equity* terhadap kinerja., memiliki hubungan kuat,
7. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *efficiency and effectiveness* terhadap kinerja. Sedangkan hubungan antara *efficiency and effectiveness* terhadap kinerja adalah kuat,
8. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *accountability* terhadap kinerja. Sedangkan hubungan antara *accountability* terhadap kinerja adalah kuat,

9. UML (*Unified Modelling Language*) mendefinisikan 13 buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram yaitu *structure diagram*, *behavior diagram* dan *interaction diagram*. Yang tergolong ke dalam *structure diagram* yaitu *Class Diagram*, *Component Diagram*, *Composite Structure Diagram*, *Deployment Diagram*, *Object Diagram*, *Package Diagram*. Untuk memodelkan GGG dan Kinerja Pemda Depok.

#### 4.5. Saran

Dari hasil penelitian diperoleh pengaruh *good governance government* yang belum optimal dilakukan oleh Pemda Kota Depok yaitu *equity*, *participation* dan *rule of law*. Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan tentang tata cara mendapatkan informasi apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat dan mendayagunakan media elektronik untuk menyampaikan informasi lengkap pemerintah daerah dalam mewujudkan *equity* pada Pemda Kota Depok. Dalam hal *participation* pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sarana komunikasi yang telah ada agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya seperti mengadakan pertemuan umum atau temu wicara. Dan untuk mewujudkan *rule of law* pemerintah mengupayakan peraturan daerah yang bijaksana dan efektif didukung dengan penegakan hukum yang adil. Untuk penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya mengganti metode pengukuran kinerja dengan metode selain *Balance Scorecard*, sehingga peneliti bisa mengetahui pengaruh *good governance government* dengan metode pengukuran kinerja yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2011. *Manajemen sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari teori ke praktek*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sjahrial, Dermawan dan Djahotman Purba. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009b. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh (Ed.). 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



- Soleh, Chalib dan Suripto. 2011. *Menilai kinerja pemerintahan daerah*. Bandung: Fokus Media. Otonomi\_Daerah\_TK.pdf, diakses 22 Mei 2012).
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara. Made, Anwar. 2005. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol.1, no.2 : 140-161.
- Trihendradi, C. 2009. *Step by Step SPSS 16 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Andi Offset Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Makalah disajikan dalam the 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2012. *Pokok-pokok audit manajemen*. Jakarta : Harvarindo Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Solikin, Ikin. 2011. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan (Survei pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Skripsi, Artikel dan Disertasi : Alamsyah. 2010. Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika*, vol. 3, no.6: 1-9. Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi sebagai Mediasi. *Jurnal Akuntabilitas*, vol. 1, no. 1: 65, dilihat 8 Mei 2012, <[http://journal.aktfebuinjt.ac.id/?page\\_id=65](http://journal.aktfebuinjt.ac.id/?page_id=65)> Ulum, Akhmad Samsul. 2011. Peran Pengukuran Kinerja dalam Mendukung Good Governance dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, vol. 3, no.1 : 60-66.
- Darmanto. 2006. Organisasi Pemerintah Daerah: Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good Governance). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, vol. 2, no.1: 35-49. Wijayanti, Firda. 2011. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok*. (Online), ([http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file\\_skripsi/lis\\_pustaka\\_473744436223.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_skripsi/lis_pustaka_473744436223.pdf), diakses 23 Mei 2012).
- Direktorat Aparatur Negara. 2006. *Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional. Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no.1 : 21-37.
- Enceng, Lisetyodono BI, dan Purwaningdyah MW.2008. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, vol. 2, no. 1: 33-42. Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurniawan, Teguh. 2006. *Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah : Perspektif UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004*. (Online), ([http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/Tugas\\_](http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/Tugas_) PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Akhmad Syakhroza, 2005. *Corporate Governance*(Sejarah dan perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN), *Pidato Pengukuhan Gurus Besar – U.* Penerbit FE-UI, pp. 1 – 90
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, 2004. Komisaris Independen, Penggerak Praktek *Good Corporate Governance* di Perusahaan, PT. Indeks Kelompok Gramedia, ISBN:979-683-726-9, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta
- Asian Development Bank-ADB, 2003. *Diagnostic Study of Accounting and Auditing Practice (Private Sektore) Republic of Indonesian, Philippines*, 21 February.
- Atkinson et al. 1997; Ittner et al. 1997; Kaplan and Norton 1996; Lynch and Cross 1991; Shields 1997. Dalam artikel Zahinul Hoque & Wendy James, 2000. *Lingking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors: Impact on Organizational Performance*, *JMAR*. Volume Twelve. pp. 1 – 17
- Barbara Gunawan, 2000. Menilai Kinerja dengan Balanced Scorecard, *Manajemen*, September. pp. 36-40
- Berle Jr., Adolf A. and Gardiner C. Means, 1932. *The Modern Corporation and Private Property.* New York: Macmillan.
- Berle Jr., Adolf A. and Gardiner C. Means. [1932] 1935. *The Modern Corporation and Private Property.* New York: Macmillan.
- Berman et al., 1999. Does Stakeholders Orientation Matter, *Academy Management Journal*, Vol.42, No.3 pp.488-506, dalam Ahmad Syakhroza. *Usahawan* No.10 TH XXIX Oktober 2000.
- Bromwich & Bhimany, 1994. *Management Accounting: Patways to progress*, The Chartererd institut of management accounting, dalam Ahmad Syakhroza. *Usahawan* No.10 TH XXIX Oktober 2000
- Burchell et.al, 1980. The roll of accounting in organizations and society , dalam Ahmad Syakhroza. *Usahawan* No.10 TH XXIX Oktober 2000
- Cragg, Michael I. & Dyck I.J.A., 1999. dalam Tulisan Ahmad Syakhora. Bagaimana Mengukur Terciptanya “ Good Corporate Governance”, *Usahawan* No. 10 TH XXIX Oktober, 2000
- Dolog Hutagalung, 2004. Disertasi, *Pengaruh Penerapan prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Sumber Keunggulan terhadap Kinerja Keuangan : Suatu analisis terhadap BUMN di indonesia*, Universitas Padjadjaran Bandung.
- FCGI( Forum For Corporate Governance In Indonesia). 2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essense of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia.* Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication
- H.Sri Sulistyanto & Meniek S.Prapti, dalam *EKOBISNIS*.2003(2003:83-93)
- Haas, E.A, 1987. Breakthrough manufacturing. *Harvard Business Review*, march- April, hal: 75-81, dalam Ahmad Syakhroza. *Usahawan* No.10 TH XXIX Oktober 2000
- Herwidayatmo, 2000. Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia, *Usahawan*, Oktober No. 10 th XXIX:25-32 2001, Belajar Dari Pengalaman Thailand Dalam penerapan, *good corporate governance Indonesia, Paper* pada The 7<sup>th</sup> CEO Briefing, CLDI, Jakarta.
- Hiro Tugiman, 2000. *Pengaruh Peran auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan kinerja Perusahaan.* Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung. Pp.1-217

- 1 Hoque et al. 1997; Creelman, 1996; Atkinson et al (1997, 94). Dalam artikel Zahirul Hoque & Wendy James, 2000. Lingking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors: Impact on Organizational Performance, *JMAR*. Volume Twelve. pp. 1 – 17.
- IICG (Indonesian Institute on Corporate Governance), 2002. *Corporate Governance atau Corporate Failure?*. The Indonesian Institute of Corporate Governance.
- Indonesian Capital market Directory, 2004. *ECFIN*, Institute for Economical and Financial Research, Fifteenth Edition.
- Iskander, M & Chamlou, N, (2000). *Corporate Governance: An Framework For Implementation*, Washington D.C, USA: The World Bank.
- Jones. Gareth R, 2004. *Organizational Theory., Theory, Design and Change, Text and Cases*. Fourth Edition New Jersey: Pearson Education International, 2004.
- Kaplan and Norton (1996b). Dalam artikel Otto H. Chang & Chee W. Chow, 1999. The Balanced Scorecard: A Potential Tool For Supporting Change and Continous Improvement in Accounting Education, *Issues accounting Education*. Volume 14, No. 3. pp. 395 – 412
- 1 Kaplan and Norton 1992, 1993, 1996. Dalam artikel Zahirul Hoque & Wendy James, 2000. Lingking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors: Impact on Organizational Performance, *JMAR*. Volume Twelve. pp. 1 – 17.
- 1 Kaplan and Norton, 1993. *Putting The Balanced Scorecard to Work*, *Harvard Business Review*, pp. 134 – 148.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79
- Makaliwe, Willem A, (2000). Krisis Ekonomi di Indonesia: Belajar dari pengalaman tiga tahun, *Usahawan*, No. 10. ThXXIX, Oktober 2000.
- Mia, Lokman and Clarke, Brian, 1999. Market Competition, Management Accounting Systems and Business Unit Performance. *Management Accounting Research*, Vol. 10 pp.137-158, 295 dalam Ahmad Syakhroza. *Usahawan* No.10 TH XXIX Oktober 2000
- Michie, Jonathan and Oughton, Chritine , 2001. Employee Share-Ownership Trusts and Corporate Governance. *MCB University Press*, 1427 – 0701, *Corporate Governance*, 1, 3, pp. 4 – 8.
- Pratana Puspa Midiastuty, 2003 Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan indikasi Manajemen Laba, *Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya 16 – 17 Oktober 2003*. Pp. 176 – 212
- Raber, W Roger. (2003). The Role of Good Corporate Governance in Overseeing Risk, *The Corporate Governance Advisor*, Volume.11. Numner 2. pp. 11 – 16
- Rampersad, Hubert. K. 2003. *Total Performance Scorecard-Redifining Management to Achieve Performance With Integrity*, Buterworth-Heinemann, First Printed in India, pp.18-30
- Sekar mayangsari, 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas audit, serta Mekanisme *Corportae Governance* terhadap Intergritas Laporan Keuangan , *Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya 16 – 17 Oktober 2003* Pp. 1255 – 1286
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. A survey of corporate governance
- Simmons, HA 1997. *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization* (Second ed.). New York: Macmillan
- Siswanto Sutojo dan E John Aldrige, 2005. *Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Sehat)*, PT. Damar Mulia Pustaka, ISBN 979-9365-16-3.
- Smieliauskas (1992). dalam Lemon et al. (2000). Dalam artikel Conor O'leary, 2004. Developing A standardised Model For internal

- control Evaluation. *The Irish Accounting Review*(2004), Vol.11, No.2. pp.35-57.
- Solomon, 1987. Dalam penelitian-penelitian *empiris* oleh Mock and Turner 1981; Trotman and Yetton, 1985). Dalam Jane Ham. et.al, 1984. A Note on The Neutrality of Internal Control System in Audit Practice. *Contemporary Accounting Research*.Vol.2. No.2. pp.311-317
- Solomon, Jill and Solomon, Aris, 2004: *Corporate Governance and Accountability*, John Wiley & Sons, Ltd, 2004
- Steinhorsedotir, Lilja, 2003. Internal Control: *Corporate Governance, Internal Audit and Strategic Renewal*, Monetary Bulletin.
- Sternberg E (1998); *Corporate Governance: Accountability in the Marketplace*; London; IEA
- Sternberg E (1998); *Corporate Governance: Accountability in the Marketplace* ; London; IEA
- Suprayitno, G., Khomsiyah G.I., Sedarnawi Yasni., Dadi Krismantoro., Lola Rita., dan Rika Gelar Rahayu., 2004. *Good Corporate Governance: Learning Toward a New Stage: The Indonesian Institute for Corporate Governance*, Jakarta.
- Tricker, L. Robert, 1994. *International Corporate Governance: Text, Reading and Cases*, Prentice Hall, Simon&Schuster (Asia) Pte. Ltd, Singapore .
- Williamson, Oliver E. (1996) *The Economic Institutions of Capitalism*, New York
- www.oecd.gov. 1998. OECD. *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*.
- Yudhiantara. M. 2009 African Capacity Building Foundation (ACBF), 2001, *Capacity Needs Assessment : A Conceptual Framework*, in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12

# Model Perancangan Good Governance Government Untuk Mewujudkan Government Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Pada Pemerintah Kota Depok

## ORIGINALITY REPORT

<b>1</b> %	%	<b>1</b> %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Hoque, Zahirul James, Wendy. "Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors: Impact on Organizational Performance", Journal of Management Accounting Research, Annual 2000 Issue  
Publication **1** %
- 2** Bunga Indah Bayunitri, Savitri Putri. "The Effectiveness of Visualization the Logo towards Brand Awareness (Customer Surveys on Product "Peter Says Denim")", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016  
Publication **1** %

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%